

**MALAKAH PRNGEMBANGAN KONSEP DASAR IPS
STANDAR IPS DALAM NCSS DAN KURIKULUM INDONESIA**

DOSEN PENGAMPU:

Dr. Pujiati, M.Pd

Dr. Irma Lusi Nugraheni, M.Pd

Dr. Nikki Tri Sakung. M.Pd.



Oleh:

Kelompok 2

Amaradina Fatia Sari 2523031004

Diah Rachmawati Syukri 2523031003

Habiba Husna Hotimah 2523031006

**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul *“Standar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam NCSS dan Kurikulum Indonesia”* tepat pada waktunya.

Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk upaya memperdalam pemahaman mengenai konsep standar pendidikan IPS, baik yang dikembangkan oleh National Council for the Social Studies (NCSS) di Amerika Serikat maupun yang diterapkan dalam Kurikulum Indonesia. Diharapkan pembahasan dalam makalah ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkaya wawasan, terutama bagi mahasiswa, pendidik, serta pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan.

Dalam proses penyusunan makalah ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan makalah ini.
2. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan masukan dan berdiskusi dalam proses penulisan.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun turut berkontribusi dalam penyelesaian makalah ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan makalah di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Pendahuluan.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Makalah.....	2
BAB II	3
PEMBAHASAN	3
2.1. Definsi dan Tujuan IPS.....	3
2.2. Standar IPS dalam NCSS	4
2.3. Standar / Kurikulum IPS di Indonesia	4
2.4. Perbandingan NCSS dan Kurikulum Indonesia	6
BAB III	8
PENUTUP	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Perkembangan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai bagian dari kurikulum nasional menuntut adanya standar yang jelas mengenai kompetensi, muatan pembelajaran, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Di Amerika Serikat, National Council for the Social Studies (NCSS) menyediakan kerangka standar kurikulum sosial yang komprehensif untuk menjamin bahwa pembelajaran sosial studies membangun kompetensi sipil, kemampuan berpikir kritis, dan pemahaman lintas-disiplin (sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, antropologi) sebagai dasar pengembangan warga negara yang aktif. NCSS menekankan perlunya prinsip-prinsip seleksi dan organisasi isi untuk menjadikan program IPS/ Social Studies valid dan kontekstual (www.socialstudies.org, dikutip 29 september 2025, pukul 13.50 WIB).

Standar kurikulum di IPS atau Social Studies, dikelola oleh National Council for the Social Studies (NCSS), yang adalah standar kurikulum nasional pertama kali diterbitkan pada tahun 1994. Mulai saat itulah standar studi sosial telah banyak dan berhasil digunakan sebagai kerangka kerja untuk pendidik, sekolah, wilayah, negara bagian, serta negara-negara lain sebagai alat untuk penyelarasan dan pengembangan kurikulum, termasuk pula di Indonesia (Sulianta, 2025)

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam konteks pendidikan di Indonesia merupakan bidang studi yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial (geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, ilmu politik). Di Amerika Serikat, konsep serupa dikenal dengan istilah Social Studies, yang bertujuan membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

Di Indonesia, standar kurikulum IPS diatur melalui regulasi nasional yang merujuk pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka memuat standar kompetensi inti,

kompetensi dasar, serta capaian pembelajaran IPS yang menekankan integrasi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi secara terpadu (Sanjaya, 2016). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan IPS di Indonesia, yakni membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar mampu memahami realitas sosial serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Siska, 2020).

Meskipun memiliki konteks yang berbeda, baik standar NCSS maupun kurikulum IPS Indonesia sama-sama menekankan pada pembentukan karakter warga negara yang kritis, demokratis, dan bertanggung jawab. Perbandingan ini penting untuk melihat keselarasan maupun perbedaan dalam pendekatan, struktur standar, serta relevansi kurikulum terhadap tantangan sosial kontemporer, seperti globalisasi, literasi digital, dan isu keberlanjutan. Oleh karena itu, analisis terhadap standar IPS dalam NCSS dan kurikulum Indonesia menjadi relevan untuk memperkuat pengembangan pendidikan IPS yang adaptif dan kontekstual.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standar IPS yang dikembangkan dalam NCSS?
2. Bagaimana standar kurikulum IPS di Indonesia dirumuskan dan diimplementasikan?
3. Bagaimanakah perbandingan antara standar IPS NCSS dan kurikulum IPS Indonesia?

1.3. Tujuan Makalah

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Mendeskripsikan standar IPS menurut NCSS.
2. Menganalisis standar IPS dalam kurikulum Indonesia.
3. Membandingkan kesesuaian dan perbedaan standar IPS NCSS dengan kurikulum IPS di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Definsi dan Tujuan IPS

Pada hakikatnya, IPS merupakan sebuah mata pelajaran wajib di tingkat pendidikan dasar dan menengah yang memuat berbagai disiplin ilmu sosial yang saling terintegrasi. Karena itu, IPS memiliki konteks pengertian yang tidak jauh berbeda dengan ilmu sosial karena konsepkonsep IPS adalah hasil perpaduan berbagai konsepkonsep ilmu sosial tersebut. National Council for Social Studies (NCSS) merumuskan definisi IPS secara rinci sebagaimana dikutip Supardi (2011: 182) sebagai berikut: "... studi terpadu ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk mempromosikan kompetensi kewarganegaraan. Dalam program sekolah, studi sosial menyediakan studi terkoordinasi dan sistematis yang memanfaatkan disiplin ilmu seperti ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, antropologi, arkeologi, psikologi, agama, dan sosiologi, serta konten yang sesuai dari humaniora, matematika, dan ilmu alam. Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ditujukan untuk meningkatkan kompetensi warga negara, membantu kaum muda dalam membuat keputusan untuk kepentingan publik sebagai warga masyarakat yang beragam secara budaya dan demokratis, dalam dunia yang saling bergantung (Winataputra & Darajat, 2011)."

IPS dirancang untuk menyederhanakan ilmu-ilmu sosial agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Ulya dkk. (2023), IPS menggabungkan geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, dan ekonomi untuk membentuk peserta didik yang mampu memahami lingkungan sosialnya. IPS tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap sosial dan keterampilan berpikir kritis. Dalam kajian kurikulum, standar pendidikan berfungsi sebagai pedoman minimum tentang isi pembelajaran, proses, kompetensi yang diharapkan, serta penilaian hasil belajar. Standar kurikulum juga berfungsi untuk menjaga konsistensi mutu pendidikan nasional dan memastikan kesetaraan pencapaian antarsekolah.

Secara filosofis, IPS mengandung dimensi ontologis (apa yang dipelajari, yaitu fenomena sosial), epistemologis (bagaimana cara memperoleh pengetahuan), dan aksiologis (nilai-nilai yang ingin ditanamkan). Hal ini menunjukkan bahwa IPS adalah mata pelajaran yang strategis dalam membentuk warga negara.

2.2. Standar IPS dalam NCSS

National Council for the Social Studies (NCSS) adalah organisasi profesional yang sejak lama mengembangkan standar untuk pengajaran IPS di Amerika Serikat. Pada tahun 2010, NCSS merilis dokumen '*National Curriculum Standards for Social Studies*' yang menjadi rujukan internasional. Dokumen ini memperkenalkan 10 tema utama, yaitu:

- 1) Culture,
- 2) Time, Continuity, and Change,
- 3) People, Places, and Environments,
- 4) Individual Development and Identity,
- 5) Power, Authority, and Governance,
- 6) Production, Distribution, and Consumption,
- 7) Science, Technology, and Society,
- 8) Global Connections,
- 9) Civic Ideals and Practices,
- 10) Institutions.

Standar ini menekankan tiga aspek utama: (1) Knowledge atau konten yang harus dikuasai, (2) Processes atau keterampilan berpikir dan inkuiri, dan (3) Dispositions atau sikap kewarganegaraan. Dengan kerangka ini, IPS diharapkan mampu melahirkan siswa yang memiliki wawasan global namun tetap berakar pada nilai demokrasi.

2.3. Standar / Kurikulum IPS di Indonesia

IPS di Indonesia mulai diperkenalkan sejak Kurikulum 1975 sebagai mata pelajaran integratif. Dalam Kurikulum 1984 dan 1994, IPS tetap menjadi pelajaran yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu sosial. Sejak Kurikulum

2004 (KBK) hingga Kurikulum 2013, IPS terus mengalami perubahan dalam hal struktur dan pendekatan. Dalam Kurikulum 2013, IPS di tingkat SD terintegrasi ke dalam pembelajaran tematik. Sementara di SMP, IPS masih diajarkan sebagai satu mata pelajaran gabungan. Di tingkat SMA, disiplin ilmu sosial dipisahkan menjadi mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan sejak 2021 memberikan fleksibilitas lebih besar. IPS dapat diajarkan secara lebih kontekstual dengan menekankan proyek pembelajaran dan Profil Pelajar Pancasila. Standar kurikulum Indonesia mencakup standar isi, kompetensi inti, kompetensi dasar, proses, dan penilaian. Tujuan utama tetap sama, yaitu membentuk peserta didik yang peka sosial, kritis, dan berkarakter.

Perjalanan kurikulum IPS mengalami beberapa fase:

1. Kurikulum 1975 / GBPP 1975.

Materi IPS sudah ada sejak kurikulum pra-1975 dan dalam Kurikulum 1975 menjadi bagian dari GBPP bidang studi IPS untuk SD. Dokumen GBPP 1975 mencakup tujuan kurikuler, instruksional, pokok bahasan, sub pokok bahasan dan bahan ajar.

2. Kurikulum KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi, KBK) dan Kurikulum 2004/2006.

(KTSP) KBK memperkenalkan pendekatan kompetensi. Kurikulum 2006 (KTSP) menekankan bahwa setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulum berdasarkan standar nasional — mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Dalam aspek IPS, materi geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi dicakup secara terpadu, terutama di tingkat SMP dan SD.

3. Kurikulum 2013.

Memperkuat kompetensi inti dan dasar, dan mulai menggunakan pendekatan tematik di SD, serta pendekatan terpadu pada IPS di SMP/SMA. Fokus pada pengembangan karakter, literasi, dan numerasi serta muatan lokal (Sabila, dkk., 2025).

4. Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka (KuMer) adalah transformasi kurikulum yang lebih fleksibel dan kontekstual. Memberikan keleluasaan kepada guru dan sekolah dalam merancang pembelajaran, memilih materi yang esensial, serta menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan lokalitas. Standar proses, penilaian, serta materi IPS perlu menjawab tantangan zaman seperti era Society 5.0, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, demokrasi sosial, kepekaan terhadap masalah sosial (Kamil & Pramudiya, 2016).

2.4. Perbandingan NCSS dan Kurikulum Indonesia

Persamaan mendasar antara standar NCSS (*National Council for the Social Studies*) dan kurikulum IPS di Indonesia adalah keduanya sama-sama menekankan pentingnya penguasaan kompetensi kognitif, keterampilan berpikir sosial, serta pembentukan karakter warga negara. NCSS melalui sepuluh tema utamanya menegaskan bahwa pembelajaran IPS tidak hanya berhenti pada pemahaman konsep, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dalam konteks sosial (NCSS, 2010). Hal serupa juga tercermin dalam kurikulum IPS Indonesia yang berlandaskan pada tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, kreatif, dan bertanggung jawab sebagai warga negara (Susanto, 2016). Selain itu, keduanya menekankan pendekatan tematik dan integratif, yakni menghubungkan berbagai disiplin ilmu sosial serta mengaitkan pembelajaran dengan permasalahan nyata yang ada di lingkungan sekitar siswa (Sapriya, 2017).

Adapun perbedaan penting antara NCSS dan kurikulum Indonesia terletak dalam penekanan dan orientasi antara keduanya. NCSS lebih eksplisit dalam menekankan pentingnya *dispositions* atau sikap siswa, seperti toleransi, empati, partisipasi demokratis, dan kepedulian terhadap isu-isu global (NCSS, 2010). Hal ini sejalan dengan pandangan Banks (2008) bahwa pendidikan IPS seharusnya mampu membentuk *multicultural citizenship* yang sadar akan keberagaman dan keadilan sosial. Sementara itu, kurikulum IPS Indonesia lebih menitikberatkan

pada integrasi nilai-nilai lokal dan ideologi Pancasila sebagai landasan utama dalam pembentukan karakter. Meskipun nilai-nilai Pancasila relevan dan kontekstual bagi bangsa Indonesia, penekanan yang terlalu normatif sering kali membuat proses pembelajaran terjebak pada ranah kognitif dan hafalan, sehingga kurang menekankan disposisi kewarganegaraan secara eksplisit.

Selain itu, perbedaan lain terletak pada struktur kurikulum. Kurikulum IPS di Indonesia dirancang dalam kerangka standar nasional yang seragam dari pusat, sehingga ruang bagi inovasi guru relatif terbatas (Mulyasa, 2018). Sebaliknya, standar NCSS lebih bersifat fleksibel dan berfungsi sebagai panduan yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan daerah maupun sekolah. Fleksibilitas ini memungkinkan guru dan institusi pendidikan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi lokal dan isu global yang sedang berkembang.

Implikasi bagi pengembangan kurikulum IPS di Indonesia adalah pentingnya mengambil inspirasi dari NCSS, khususnya dalam hal perumusan disposisi kewarganegaraan yang lebih jelas dan terukur, sehingga siswa tidak hanya mengetahui nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mampu menginternalisasi dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Indonesia perlu menyeimbangkan antara penerapan standar nasional yang seragam dengan fleksibilitas adaptasi lokal, agar kurikulum tetap memiliki arah nasional tetapi juga responsif terhadap kebutuhan daerah dan dinamika global. Dengan langkah tersebut, kurikulum IPS Indonesia dapat menjadi lebih adaptif, relevan, dan efektif dalam membentuk generasi muda yang memiliki identitas kebangsaan yang kuat sekaligus kesiapan menghadapi tantangan global.

BAB III

PENUTUP

Standar NCSS (National Council for the Social Studies) menyediakan kerangka konseptual yang bersifat internasional dan menekankan pada pengembangan kompetensi kognitif, keterampilan sosial, disposisi kewarganegaraan, serta kesadaran global. Kerangka ini dapat menjadi acuan penting dalam perancangan kurikulum IPS di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sementara itu, kurikulum IPS Indonesia memiliki kekuatan tersendiri karena menekankan relevansi lokal melalui integrasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, serta konteks sosial-budaya yang sesuai dengan karakter bangsa. Perbandingan keduanya menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi memperkaya kurikulum IPS dengan mengadopsi elemen-elemen positif dari NCSS, khususnya dalam aspek disposisi kewarganegaraan, keterampilan berpikir kritis, dan orientasi global, tanpa harus kehilangan identitas nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, integrasi antara orientasi global ala NCSS dan kekhasan lokal dalam kurikulum Indonesia dapat menciptakan model pembelajaran IPS yang lebih seimbang, kontekstual, dan relevan dengan tantangan abad 21.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk pengembangan kurikulum IPS di Indonesia. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi standar IPS dalam konteks pendidikan Indonesia, sehingga dapat diketahui sejauh mana konsep NCSS dapat diadaptasi tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal. Kedua, penguatan kapasitas guru sangat diperlukan, terutama dalam hal penerapan pendekatan tematik, integratif, dan berbasis inquiry agar pembelajaran IPS tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan disposisi kewarganegaraan. Ketiga, pengembangan modul pembelajaran yang berbasis konteks lokal perlu ditingkatkan, sehingga siswa dapat mengaitkan konsep IPS dengan realitas sosial di sekitarnya sekaligus memahami isu-isu global. Terakhir, evaluasi kurikulum harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kurikulum IPS tetap relevan dengan kebutuhan zaman, baik dalam menghadapi dinamika nasional maupun global.

STUDI KASUS

Di sebuah SMP di Kota Bandung, guru IPS menghadapi tantangan saat membandingkan bahan ajar dari NCSS dengan kurikulum nasional. Guru menemukan:

Materi IPS Indonesia lebih banyak menekankan aspek pengetahuan faktual (misalnya kronologi sejarah nasional, peta wilayah, kegiatan ekonomi daerah).

Standar NCSS lebih menekankan kompetensi keterampilan sosial dan kritis (misalnya simulasi sidang warga, analisis konflik global, studi kasus hak asasi manusia).

Hal ini memunculkan pertanyaan:

Apakah pendekatan IPS di Indonesia sudah sejalan dengan kebutuhan membentuk warga global yang kritis seperti yang diamanatkan NCSS?

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J. A. (2008). *Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age*. *Educational Researcher*, 37(3), 129–139.
- Fauziah, N. N., Lestari, R., & Arifin, M. H. (2022). Perkembangan Pendidikan IPS di Indonesia pada Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Ar-Riayah*, 6(2).
- Feri Sulianta. (2020). *Buku Literasi Digital, Riset dan Perkembangannya dalam Perspektif Social Studies*.
- Kamil, N., V. & Pramudiya, G., A. (2016). Transformasi Kurikulum Pendidikan IPS dalam Kesiapan Menyambut Era Society 5.0. *JIPSINDO (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia)*, 3 (2), 1-22.
- Mulyasa, E. (2018). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- National Council for the Social Studies. (2010). *National Curriculum Standards for Social Studies: A Framework for Teaching, Learning, and Assessment*. Washington, DC: NCSS. <https://www.socialstudies.org/standards/national-curriculum-standards-social-studies-introduction>
- Putri, A. N. (2022). Perkembangan Kurikulum IPS SD. *Jurnal EE, Universitas Gha*.
- Sabila, L., Padilah, A., Putra, M., D., P., Apriana, R., N., & Kurnia, B. (2025). Perkembangan Kurikulum Merdeka Pendidikan IPS di Indonesia Permasalahan dan Urgensi. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10 (2), 1-10.
- Sanjaya, W. (2016). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana.
- Sapriya. (2017). *Pendidikan IPS: Konsep dan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siska Y. (2020). *Konsep Dasar IPS untuk SD/MI*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Sulianta, F. (2025). Kurikulum National Council for the Social Studies (NCSS). Artikel. Universitas Widayatama.
- Susanto, A. (2016). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana.